

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi Dan krisis yang melanda Negara republik Indonesia mengakibatkan meningkatnya masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan (Anjal) merupakan dua istilah yang digunakan untuk menunjuk seseorang yang hidupnya menggelandang, meminta minta tanpa memiliki tempat tinggal secara tetap. Gelandangan dan Pengemis boleh dikatakan bagaikan dua keping mata uang yang tidak terlalu jauh dalam hal perbedaan, karena keduanya secara fungsional bisa terjadi dalam saat yang bersamaan. Gelandangan bisa sekaligus menjadi pengemis, demikian pula pengemis bisa menjadi gelandangan. Gepeng maupun Anjal hidupnya dengan mengharap belas kasihan dari orang lain dengan cara mengemis atau mengamen. Gepeng dan Anjal hidup dan mempunyai tempat tinggal di kolong jembatan, stasiun kereta api dan membangun gubuk liar di tepi sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan lingkungan masyarakat.

Gelandangan adalah orang - orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang - orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta - minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980).

Ada dua golongan gepeng yang masih bertebaran di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pertama, warga asli Sidoarjo. Kedua, warga dari luar daerah yang sengaja meminta-minta di Sidoarjo. Nah, khusus gepeng asli Sidoarjo, pihaknya tengah menyiapkan program rehabilitasi. Mereka akan diamankan dan dibawa ke liponsos untuk mendapat pembinaan. ”Yang jadi masalah sekarang adalah gepeng yang berasal dari luar,”

(Jawapos.com tanggal 17 Februari 2017)

Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur gencar melakukan razia terhadap orang gila dan gelandangan. Razia yang dilakukan sejak dua minggu terakhir berbuah hasil. Sebanyak 10 orang diduga gila dan gelandangan berhasil diamankan petugas. Razia dilakukan di sejumlah wilayah di Sidoarjo yang kerap dijadikan tempat mangkal anak jalanan dan tempat berkeliarannya orang gila, seperti di Pasar Krian, sekitar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dan Pasar Porong.

(iNews.id tanggal 24 Februari 2018)

Mereka dapat ditemui diberbagai pertigaan, perempatan, lampu merah dan tempat umum, bahkan di kawasan pemukiman, sebagian besar dari mereka menjadikan mengemis sebagai profesi. Hal ini tentu sangat mengganggu pemandangan dan meresahkan masyarakat. Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial. Hidup bergelandangan tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga, tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap hawa panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina diperkotaan. Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan

raya, mereka juga merusak keindahan kota. Dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-lain.

Dalam hal ini kinerja dari dinas sosial kabupaten sidoarjo perlu ditambah lagi karena semakin banyaknya untuk menertibkan gelandangan dan pengemis serta anak jalanan setelah itu di berikan keterampilan agar tidak menjadi pengemis lagi maupun berkeliaran di jalanan dan memiliki usaha untuk menghidupi kehidupannya sehari – hari. Dari permasalahan sosial diatas sangat menarik untuk dijadikan penelitian tentang “ *STRATEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENANGGULANGI DAN MEMBINA GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DAN ANAK JALANAN (ANJAL)* ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan dan pembinaan gepeng dan anjal di Sidoarjo oleh dinas sosial ?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dinas sosial dalam menertibkan gepeng dan anjal ?
3. Strategi apa yang dilakukan dinas sosial dalam menanggulangi dan membina gepeng dan anjal di Sidoarjo oleh dinas sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kendala masyarakat yang ada di Indonesia yaitu adalah masalah sosial dan kinerja dari dinas sosial kabupaten sidoarjo. Adapun lebih spesifik dari tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja dari dinas sosial kabupaten sidoarjo dalam menangani dan membina gelandangan dan pengemis serta anak jalanan di liponsos Sidokare Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan hambatan dinas sosial kabupaten Sidoarjo dalam menangani gepeng dan anjal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dinas sosial kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi dan membina gepeng dan anjal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami kinerja dinas sosial sebagai upaya untuk penanganan dan pembinaan gepeng dan anjal di liponsos Sidokare Sidoarjo.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah wawasan para pembaca dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan para pengambil kebijakan guna mengentaskan kemiskinan

1.5 Definisi Konsep

Yang dimaksud dengan konsep ini adalah memberikan batasan - batasan pengertian dan istilah - istilah yang ada dalam penelitian. Hal ini sangat penting

untuk menghindari adanya berbagai penafsiran yang berbrda-beda atas arti dan maksud dari judul diatas. Istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 STRATEGI

Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu serta pembuatan suatu rencana dan proses atau cara menanggulangi atau mengurangi masalah gepeng dan anjal

1.5.2 GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

1.5.3 ANAK JALANAN

Seorang anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan hidup di jalanan atau lampu merah serta mencari makan dari cara mengamen. Usia rata – rata dari anak jalanan ini 18 tahun berpenampilan kusam, tidak terurus, serta mobilitasnya tinggi.

1.6 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kabupaten atau kota terbesar kedua di Jawa Timur dan multikomplek masyarakat yang majemuk. Lokasi penelitian ini dipilih karena masih banyaknya gepeng maupun anak jalanan di daerah perkotaan Sidoarjo yang mengganggu kenyamanan masyarakat Sidoarjo. Dan ingin membersihkan masalah sosial ini sehingga tidak ada lagi yang mengganggu dalam kenyamanan masyarakat dan lokasi ini masih banyak sekali masalah sosial yang belum terselesaikan.

1.6.2 Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, subyek penelitian atau yang menjadi informan adalah pemerintah daerah yang menangani masalah sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta anak jalanan yaitu kepala Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo dan para gelandangan dan pengemis serta anak jalanan. Pada subyek penelitian ini bersifat Purposive sampling adalah pemilihan sampling penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan memudahkan menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.

1.6.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah

- Tentang bagaimana cara dinas sosial dalam manajemen sumber daya manusia untuk menanggulangi dan membina gepeng dan anjal.
- Tentang apa faktor penghambat dan faktor pendukung dinas sosial saat penertiban gepeng dan anjal
- Tentang bagaimana strategi penanganan dan pembinaan oleh dinas sosial dalam menangani gepeng dan anjal.

1.6.4 Sumber Informasi

Yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah kepala dinas sosial kabupaten Sidoarjo dan para pegawai dinas sosial serta para gepeng dan anak jalanan di Sidoarjo.

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

1.6.6 Teknik Analisis Data

Metode ini dilakukan untuk diperoleh baik dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna mendapatkan suatu kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

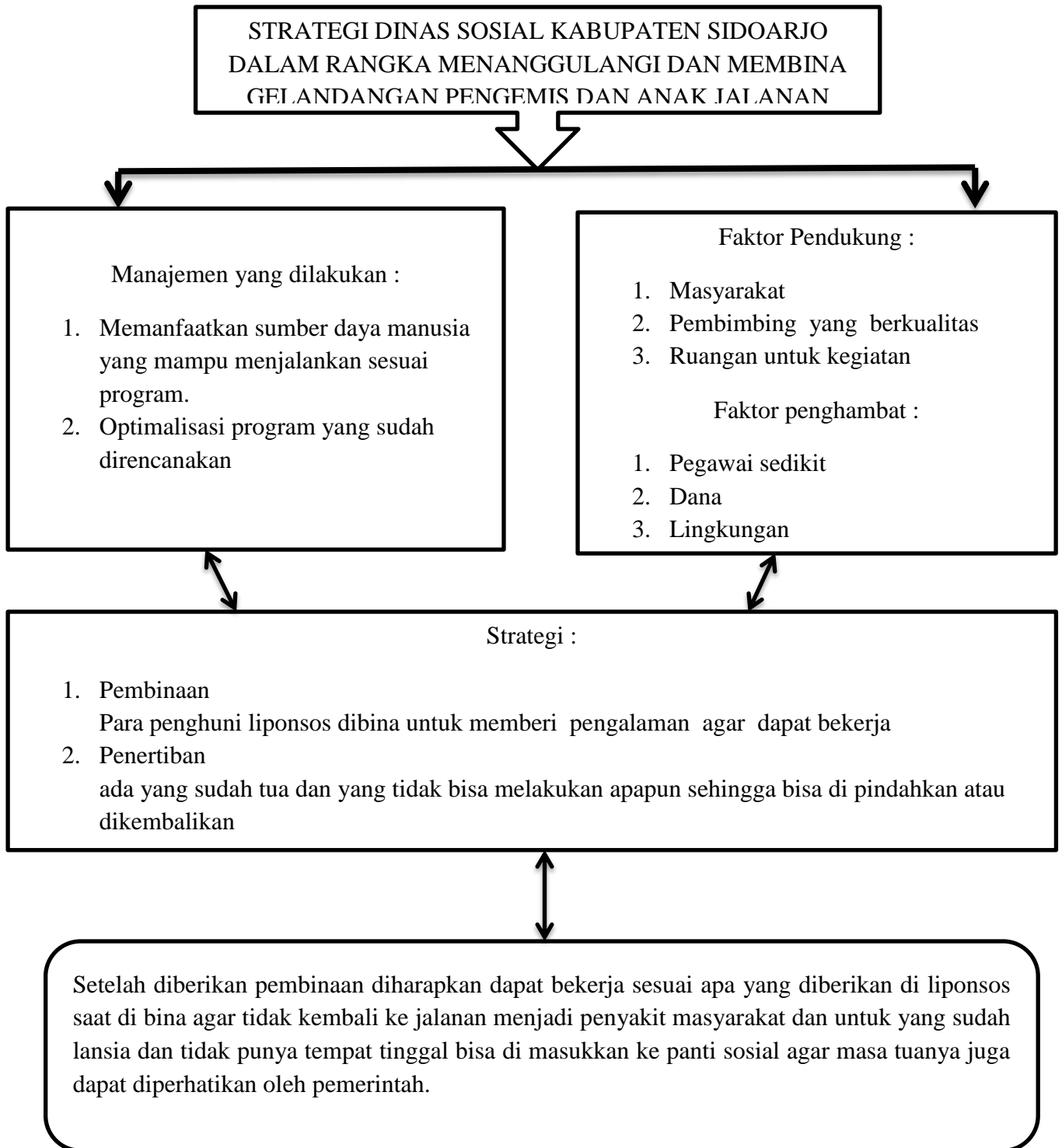
2.1 PENELITI TERDAHULU

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode dan hasil penelitian
1.	Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)	Ronawaty Anasiru (2011)	bahwa kurangnya koordinasi antara instansi terkait pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar.
2.	REALITAS ANAK JALANAN	Fedri Apri Nugroho (2014)	upaya yang diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan, tanpa melihat bagaimana

	DI KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2014		kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta.
3.	“Studi Kasus Gelandangan – Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem”	Saptono Iqbal (2007)	Penelitian ini lebih menjelaskan apa itu gelandangan, mengapa menggelandangan atau penyebabnya, mencari tahu sejarah lahirnya gepeng di lokasi penelitian, faktor yang mempengaruhi, pandangan hidup gepeng, dan kemudian peran serta pemerintah dalam penanggulangan gepeng.
4.	Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Jhon Ferlin (2014)	Implementasi sebuah UU, namun skripsi ini fokus pada salah satu institusi yaitu Dinas Sosial dan bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani anak

(TABEL. 1)

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL



2.3 PEMBINAAN DAN PENANGANAN DINAS SOSIAL

2.3.1 Pengertian penanganan dan pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya". (Musaneff,1991:11).

Penanganan adalah suatu cara untuk meminimalisir atau menghilangkan sesuatu yang memang menjadi suatu penyakit masyarakat sosial.

2.3.2 Strategi Penanganan Dinas Sosial

Memperbaiki sistem manajemen di dinas sosial

Dalam buku klasik tentang nilai strategis, Alan R. Nankervis, Robert .Compton, dan Terence E. McCarthy (1992) ada 4 bidang yaitu

a. Perencanaan

Perencanaan sumber daya manusia untuk memperbaiki kinerja yang ada dalam dinas sosial jadi merencanakan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sistem informasi dalam sumber daya manusia berfungsi untuk membuat keputusan cepat untuk pengelolaan.

b. Pengadaan

Dalam pengadaan pegawai diuji konsistensinya untuk bersikap objektif dan konsisten untuk mencapai tujuan harus memiliki skill untuk menyelesaikan tujuan dari dinas sosial.

c. Penghargaan

Pegawai akan diberikan haknya ketika dapat menyelesaikan tujuan agar menjadi motivasi dan lebih baik lagi.

d. Pengembangan

Dapat membantu pegawai untuk mengatasi kesenjangan kompetensi agar semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu melampaui kinerja standar.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) dan Anak Jalanan (anjal) ialah :

1. Razia

Razia merupakan proses penangkapan para gelandangan dan pengemis serta para anak jalanan lainnya. Razia ini dilakukan oleh pihak dinas sosial yang bekerja sama dengan satpol PP. operasi penangkapan ini dilakukan setiap hari dengan sasaran razia keseluruhan jalanan kota Surabaya. Dalam pengamatan peneliti, ketika polisi dan satpol PP melaksanakan razia, para PMKS berusaha untuk kabur dengan berlari

menghindari kejaran para polisi, Akan tetapi polisi jauh lebih sigap berlari mengejarnya dan kemudian diapun terjaring dalam razia tersebut.

Penangkapan yang dilakukan oleh para polisi yang bekerja sama dengan Satpol PP tersebut seringkali mengalami kesulitan, mulai dari pengejaran hingga pemberontakan yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis yang rata-rata sudah seringkali keluar - masuk Liponsos. Namun, meskipun demikian penangkapan tetap berjalan lancar dan mereka banyak yang tertangkap.

2. Penampungan sementara

Setelah dilakukan razia, para gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak jalanan diletakkan di penampungan Liponsos. Dalam penampungan ini mereka diidentifikasi sesuai dengan tempat asal dan usia produktif. Untuk gelandangan dan pengemis (gepeng) dan Anjal yang mempunyai keluarga, mereka akan dikembalikan dengan catatan dari pihak keluarga datang menjemput di Liponsos membawa persyaratan KTP dan KK. Bagi gepeng yang berasal dari luar kota, mereka dikembalikan ke kota asal mereka masing-masing.

Dalam sebuah jurnal di Dinas Sosial Kota Surabaya, proses ini termasuk dalam usaha rehabilitatif. Yaitu dalam penanggulangan gepeng dan anjal dilaksanakan dalam suatu panti sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

1) Tujuan

- a) Memberikan perawatan kepada sasaran pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari.
- b) Memberikan pelayanan-pelayanan untuk menyembuhkan gangguan-gangguan yang dialami oleh sasaran.
- c) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja serta membentuk sikap-sikap yang diperlukan guna penyesuaian sosial sasaran.
- d) Menyalurkan sasaran kedalam masyarakat sehingga mampu berkedudukan dan berperanan secara wajar dan layak menjadi warga masyarakat.

2) Sasaran

Paragelandangan dan pengemis yang telah diseleksi dalam panti observasi yang sesuai dengan klasifikasi kondisi dan permasalahannya serta sesuai dengan jenis peranan panti.

3) Usaha tindak lanjut (pengembangan)

- a) Peningkatan kesadaran berswadaya

- b) Pemeliharaan pemantapan dan peningkatan kemampuan sosial ekonomi.
- c) Penumbuhan kesadaran hidup bermasyarakat.

2.3.3 Program penanganan dinas sosial

Ada banyak program-program yang diberikan pemerintah dalam menangani permasalahan Gepeng dan Anjal ini. Kebijakan - kebijakan dari pemerintah dalam membatasi Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan untuk berada di tempat-tempat umum juga merupakan salah satu programnya. Namun pada umumnya program ini tidak dapat membuat efek jera terhadap para Gepeng dan Anjal.

Masyarakat menginginkan satu program yang benar - benar pro dengan rakyat dalam mengentaskan masalah ini, juga bagaimana untuk dapat mengembangkan masyarakat miskin untuk dapat hidup sejahtera agar masalah sosial ini tidak berulang.

Berikut adalah beberapa program yang telah ada, antara lain :

1. Panti

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan sarana tempat tinggal dalam satu atap yang dihuni oleh beberapa keluarga.

2. Liponsos

Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih

mengedepankan sistem hidup bersama didalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya.

3. Transit home

Merupakan bentuk penanganan gepend dan anjal yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap di tempat yang telah disediakan.

4. Pemukiman

Merupakan bentuk penanganan gepend dan anjal dengan menyediakan tempat tinggal yang permanen di lokasi tertentu.

5. Transmigrasi

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal baru di lokasi lain terutama di luar pulau Jawa.

2.4 GELANDANGAN DAN PENGEMIS

2.4.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis

1. Menurut Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. "Pengemis" adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka

umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

2. Menurut PP No. 31 Tahun 1980, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
3. Ali, dkk., (1990) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasimasyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.
4. Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu
 - (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya,
 - (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan

(3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

5. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg (1970 : 143-144) menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995 : 220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.

Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk maka gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada

daerah daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan konsentrasi hunian orang-orang seperti di bawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, emper took, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan yang lain.

Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dengan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

2.4.2 Ciri – ciri gelandangan dan pengemis

Ciri-ciri dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu :

1. Tidak memiliki tempat tinggal.

Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain

2. Hidup di bawah garis kemiskinan.

Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.

3. Hidup dengan penuh ketidakpastian.

Para gepeng hidup mengelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memprihatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk berobat dan lain lain.

4. Memakai baju yang compang camping.

Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

5. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntun grokok, penarik grobak.
6. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
7. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.
8. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

Namun secara spesifik, Karakteristik Gepeng dapat dibagi menjadi :

- Karakteristik Gelandangan :
 1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
 2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.

- Karakteristik Pengemis :
 1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
 2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.
 3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan ; berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
 4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Menurut Soetjipto Wirosardjono mengatakan ciri-ciri dasar yang melekat pada kelompok masyarakat yang dikategorikan gelandangan adalah:”mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbedadengan lapisan masyarakat yang lainnya, tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan pendapatan yang layak dan wajar menurut yang berlaku memiliki sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut

2.4.3 Dampak Masalah Gelandangan dan Pengemis

1. Terhadap Individu

- Tidak mendapat akses pendidikan
- Tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan
- Tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas
- Tidak dapat memberikan aspirasi dalam demokrasi karena tidak memiliki KTP
- Tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah

2. Terhadap Keluarga

- Kepala keluarga tidak dapat memenuhi perannya sebagai kepala keluarga
- Terjadi ketimpangan dalam keluarga
- Timbul masalah baru dalam keluarga seperti kriminalitas
- Tidak dapat memutuskan rantai kemiskinan keluarga karena anak tidak bias mendapat fasilitas pendidikan

3. Terhadap Masyarakat

- Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karna itu mereka di kota besar sangat mengangu

ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

- Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengancam keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

2.5 ANAK JALANAN

2.5.1 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat Anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak – anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya (Suyanto, 2010). Menurut Departemen Sosial RI (1999). Pengertian tentang anak jalanan adalah anak – anak dibawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

2.5.2 Karakteristik Anak Jalanan

- a. Berdasarkan Usia

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.

b. Berdasarkan Pengelompokan

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang

tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah 17 penampakan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

c. Berdasarkan Ciri-ciri Fisik dan Psikis

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni

1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan

2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan

kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

d. Berdasarkan Intensitas Hubungan dengan Keluarga

Aktivitas utama anak jalanan adalah berada di jalanan baik untuk mencari nafkah maupun melakukan aktivitas lain. Hal ini membuat intensitas hubungan anak jalanan dengan keluarga mereka kurang intensif. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23), indikator anak jalanan menurut intensitas hubungan dengan keluarga, yaitu:

- 1) Masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari
- 2) Frekuensi dengan keluarga sangat kurang
- 3) Sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.

e. Berdasarkan Tempat Tinggal

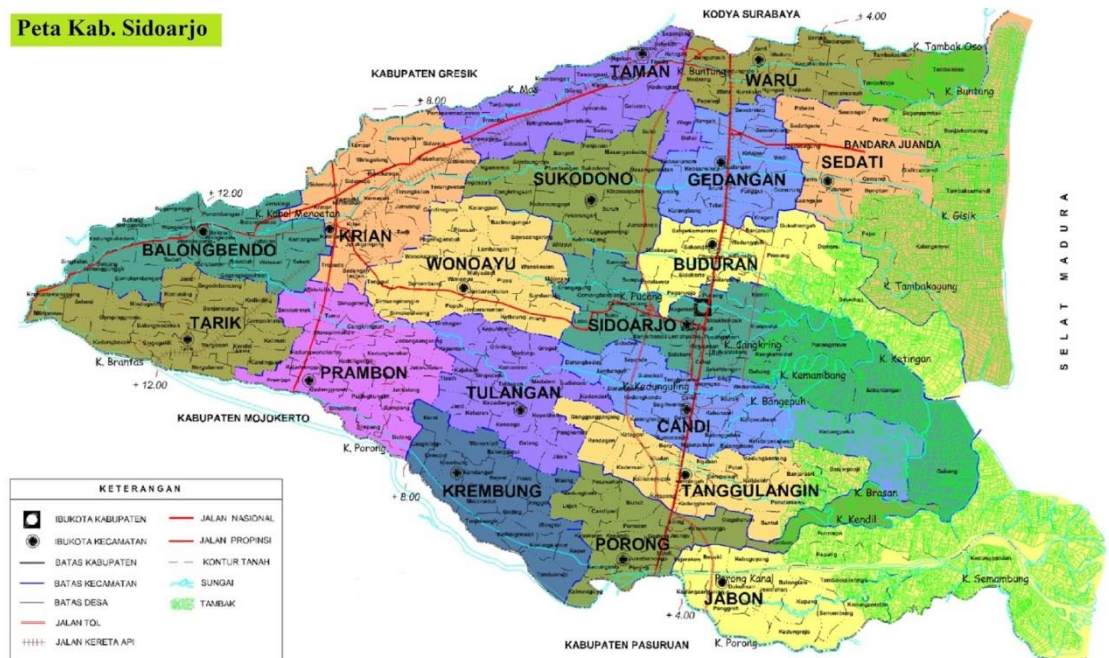
Anak jalanan yang ditemui memiliki berbagai macam tempat tinggal. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 24), indikator anak jalanan menurut tempat tinggalnya adalah:

- 1) Tinggal bersama orang tua
- 2) Tinggal berkelompok bersama teman-temannya
- 3) Tidak mempunyai tempat tinggal

BAB III

GAMBARAN OBYEK

3.1 KABUPATEN SIDOARJO



3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihipit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri,

karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidorajo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan
- c) Sebelah timur adalah Selat Madura
- d) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto

Iklim di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 KM²) dan Sedati (79, 43 KM²). Akan tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya

mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kematan itu yakni 34,61KM².

3.1.2 Aspek Demografi

Kabupaten Sidoarjo merupakan Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian.

Penduduk adalah faktor penting dalam membangun suatu pemerintahan dan pembangunan. Sebab selain menjadi obyek pembangunan penduduk sekaligus menjadi pelaku pembangunan. Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 hasil proyeksi penduduk mencapai 2.226.424 dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.122.597 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.103.827 jiwa.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SIDOARJO

MENURUT JENIS KELAMIN

S/D BULAN AGUSTUS 2018

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	TARIK	35.720	35.310	71.030
2.	JABON	42.325	41.424	83.749
3.	KREMBUNG	37.274	37.043	74.317
4.	PORONG	43.008	42.150	85.958
5.	JABON	30.338	30.136	60.519
6.	TANGGULANGIN	53.223	52.300	105.523
7.	CANDI	82.658	81.642	164.300
8.	SIDOARJO	112.271	112.647	224.918
9.	TULANGAN	52.570	51.986	104.556
10.	WONOAYU	44.569	43.962	88.531
11.	KRIAN	69.340	67.396	136.736
12.	BALONGBENDO	40.052	38.982	79.032
13.	TAMAN	117.863	114.444	232.307
14.	SUKODONO	65.757	63.256	129.013
15.	BUDURAN	53.272	52.172	105.444

16.	GEDANGAN	67.284	65.666	132.950
17.	SEDATI	55.446	53.731	109.177
18.	WARU	119.502	119.222	238.724
TOTAL		1.122.597	1.103.827	2.226.424

(SUMBER : DISPENDUKCAPIL) TABEL 2

3.1.3 ASPEK EKONOMI

Aspek Ekonomi Penduduk Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari aspek ekonomi, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada sektor Swasta. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1.	PNS	36.915
2	TNI	20.829
3.	POLRI	15.870
4	SWASTA	310.338

5	PEDAGANG	45.888
6	PETANI	29.826
7.	PERTUKANGAN	12.848
8.	BURUH TANI	23.860
9.	PENSIUNAN	22.387
10.	NELAYAN	17.598
11.	PEMULUNG	6.881
12.	JASA	41.301
TOTAL		584.541

TABEL 3

Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis

pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat Sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa

3.1.4 ASPEK SOSIAL

Realitas kehidupan sosial adalah bagian dari perilaku dan pola dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial yang menyangkut khalayak umum tentu tidak sedikit permasalahan yang lahir, sebagai konsekuensi dari banyaknya penduduk. Permasalahan sosial yang mudah dijumpai dan hampir di setiap tempat ada yakni masalah pengemis dan gelandangan. seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dinas sosial kabupaten Sidoarjo, pengemis dan gelandangan yang ada di Sidoarjo berjumlah 162 orang, yang terdiri dari 100 orang laki-laki dan 62 orang lainnya perempuan. hal ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan agar mereka memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.

3.1.5 ASPEK KEAGAMAAN

Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara. Keberagaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; Pertama, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa.

3.1.6 VISI DAN MISI

Visi

Kondisi umum Kabupaten Sidoarjo :

Visi Kabupaten Sidoarjo merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Visi Kabupaten Sidoarjo adalah:

"MANDIRI, SEJAHTERA, DAN MADANI"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan daerah serta

mencukupi kebutuhan hidup dan kehidupannya secara mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, berkecukupan material-spiritual, sejahtera lahir-batin; memegang teguh moral agama, beradab dan berakhlak mulia; menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, aman, tentram, tertib dan damai, serta masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

2. Misi

Misi Kabupaten Sidoarjo memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Misi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional.
3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

3.2 DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

3.2.1 TUGAS POKOK DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi : pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi perlengkapan; pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah; pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi

dan tatalaksana; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

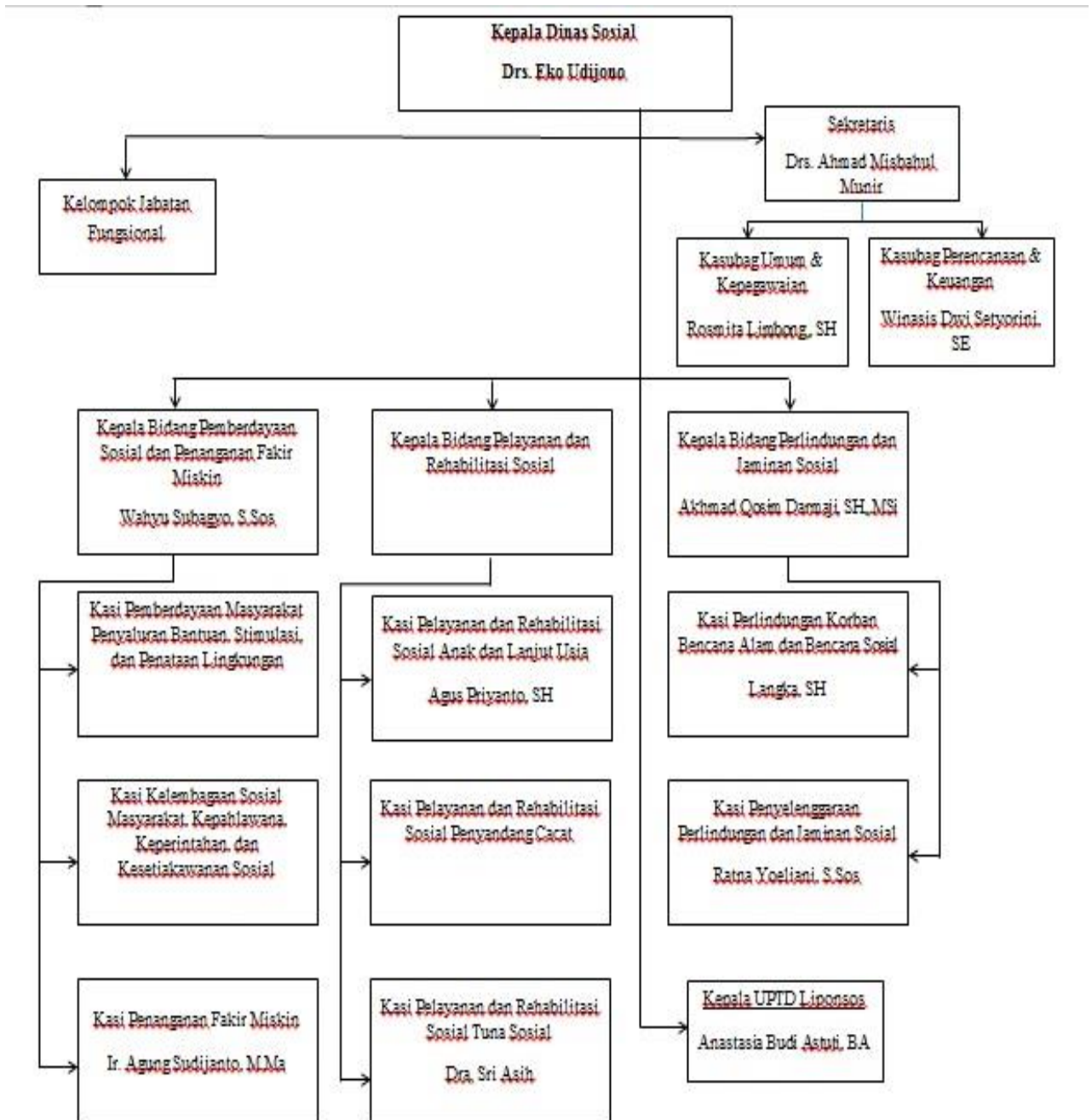
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban

konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

3.2.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO



3.2.3 VISI DAN MISI DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Visi ini memiliki arti, sebagai fasilitator di tuntut untuk mampu memberikan akses dan kemudahan bagi keluarga miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan sosial.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, adalah

1. Meningkatkan kinerja dinas
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, didukung oleh sistem dan prosedur yang pasti
3. Mewujudkan kerukunan hidup beragama, multikultur dan pelestarian nilai – nilai kepahlawanan
4. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Pada bab ini peneliti akan melakukan penyajian data yang sudah diperoleh pada saat melakukan kegiatan di lapangan yang terkait dengan Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menanggulangi dan Membina Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah berbentuk kualitatif deskriptif, penelitian yang didasarkan kenyataan dengan fakta – fakta pada objek yang selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data yang disajikan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi serta data dari sumber informasi. Kemudian dilakukan analisis data dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti menyajikan data sebagai hasil penelitian saat observasi di lapangan. Penelitian telah melakukan observasi lapangan di kabupaten Sidoarjo dengan wawancara dengan kepala Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo yang diwakili staffnya, Kepala Satpol PP yang juga diwakili oleh staffnya, serta beberapa Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan yang memang diperlukan dalam penelitian ini yang berupa informasi maupun data yang akan melengkapi penelitian ini dan dapat mengoptimalkan program – program yang ada di kabupaten Sidoarjo secara optimal sehingga mengurangi masalah PMKS.

4.1 Penanganan dan Pembinaan Gepeng dan Anjal di Sidoarjo oleh Dinas Sosial

Masalah sosial memang menyebabkan para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan di kabupaten Sidoarjo tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi, maupun keluarga. Pada umumnya tingkat pendidikan memang menjadi salah satu faktor mereka berada di jalanan karena data yang diperoleh adalah tamat pendidikan sekolah dasar (SD) yang relative pendidikan yang paling rendah dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Gelandangan dan pengemis yang sering dijumpai di kabupaten Sidoarjo rata – rata sudah berusia lanjut dan sudah tidak memiliki keluarga .

Dengan adanya para gelandangan dan pengemis serta anak jalanan yang berada di tempat – tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya:

a. Masalah lingkungan (tata ruang)

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karna itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

b. Masalah kependudukan.

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di

kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

c. Masalah keaman dan ketertiban.

Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengagu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

d. Masalah kriminalitas.

Memang tak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini di lakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.

Melihat masalah Gepeng dan Anak Jalanan ini Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo mempunyai rencana dengan merazia dan memberikan pembinaan setelah dirazia seperti apa yang telah diucapkan oleh Staff dari Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo.

Tanya : Bagaimana tanggapan Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo tentang fenomena Gepeng dan Anak Jalanan yang masih banyak di kabupaten Sidoarjo ?

Jawab : “Iya untuk fenomena ini kita dari Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo akan merazia dan mengambil para Gepeng dan Anak Jalanan dengan bantuan dari Dinas Satpol PP karena merazia adalah tugas Satpol PP sedangkan Dinas Sosial itu setelah di razia dan di bagian pembinaan yaitu di liponsos sana. “

Berdasarkan dari penjelasan diatas dalam penanganan memang dari Dinas Sosial tetapi yang memang berwenang untuk melakukan razia tersebut adalah dari Dinas Satpol PP dan setelah di razia inilah tugas dari Dinas Sosial yaitu untuk membina para gepeng dan anak jalanan. Sesuai dengan tugas masing – masing ini jadi adanya saling kerjasama untuk menanggulangi dan membina gepeng maupun anak jalanan

yang ada di kabupaten Sidoarjo lebih tenang dan nyaman. Meskipun tidak bisa menghilangkan masalah ini setidaknya bisa mengurangi agar lebih jera dan tidak kembali lagi untuk hidup di jalanan.

Setelah di razia akan ada yang namanya pembinaan di liponsos dan di data terlebih dahulu setelah itu menghubungi keluarganya atau langsung dipulangkan di daerah masing – masing sedangkan yang tidak mempunyai keluarga akan ditahan dulu di liponsos sampai ada tindakan lebih lanjut.

“ Jadi begini, setelah razia yang dilakukan satpol PP akan langsung dipindahkan di liponsos yang ada di sidokare selama 3 hari disana untuk pembinaan dan di data untuk selanjutnya akan dipulangkan ke keluarga atau di daerah masing – masing kalau tidak ada yang diambil dan tidak ada data diri akan jadi penghuni binaan disitu.”

Sesuai yang disampaikan oleh Dinas Sosial untuk pembinaan di liponsos ini dari mulai Anak Jalanan sampai Gepeng yang memang berusia 9 tahun hingga 82 tahun untuk usia yang masih dini akan dikembalikan ke orang tua masing – masing sedangkan yang sudah berusia lanjut dan tidak ada keluarga akan menjadi warga binaan di liponsos sampai ada tindakan lebih lanjut. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo di liponsos antara lain,

JENIS PEMBINAAN YANG DILAKUKAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDOARJO DI LIPONSOS

NO.	JENIS PEMBINAAN	PROGRAM
1.	BIMBINGAN SOSIAL	1. CERAMAH AGAMA 2. PEMBINAAN MENTAL 3. PEMBINAAN PSIKOLOGI
2.	BIMBINGAN KESEHATAN	PENYULUHAN KESEHATAN

TABEL 4

Jenis pembinaan yang ada diatas adalah pembinaan yang ada di liponsos sidokare kabupaten Sidoarjo yang akan membuat para gepeng dan anjal tidak kembali ke jalanan yang akan bermanfaat untuk kehidupan agar tidak bergantung di jalanan maupun membuat tidak nyamannya perkotaan. Dalam pembinaan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo tetapi bekerja sama dengan pihak – pihak terkait seperti untuk bimbingan keagamaan dibantu oleh kementrian agama agar diberikan bimbingan ceramah, mengaji, dan mental. Untuk bimbingan keterampilan dibantu oleh universitas muhammadiyah sidoarjo mulai dari keterampilan untuk soft skill maupun untuk psikologinya. Sedangkan untuk

kesehatan dibantu oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Sidoarjo. Tidak semuanya menerima untuk diberikan pembinaan masih banyak yang juga kabur dari liponsos terutama Anak Jalanan yang berpenampilan menjadi nyentrik atau bisa disebut Anak Punk.

“ sangat susah untuk memberikan pembinaan kepada penghuni binaan liponsos seperti anak punk sampai – sampai pagar besi saja bisa di potong entah menggunakan apa tetapi anak punk seperti itu bisa keluar sedangkan yang mudah adalah para gelandangan dan pengemis karena memang sudah lanjut usia dan mempunyai anak yang juga tertangkap”

Gepeng dan Anjal ini secara teknis tidak mudah untuk diselesaikan. hal tersebut terbukti dari pola pikir dan pola perilaku Gepeng dan Anjal yang masih sulit untuk dirubah. Ini dikarenakan mental hidup di jalanan yang telah terbentuk akibat terbiasanya mereka hidup di jalanan dengan mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Bahkan dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak menjamin mereka yang telah dilepas tidak akan kembali lagi ke jalan suatu hari nanti. Walaupun Proporsi jumlah kelompok sasaran dari kebijakan ini dalam hal ini adalah gepeng dan anjal, hanyalah sebagian kecil dari total populasi yang ada. Namun dikarenakan oleh mentalitas gepeng dan anjal yang sulit untuk dirubah ini lah yang menyebabkan pengimplementasian kebijakan tersebut relatif lebih sulit dari yang terlihat. Secara kuantitas kebijakan tersebut cukup efektif untuk mengurangi jumlah populasi gepeng yang ada, akan tetapi tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki kehidupan para gepeng maupun anjal sehingga dapat mengembalikan ke kehidupan yang lebih bermartabat. Apabila hal

tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah gepeng dan anjal yang ada. Berikut adalah data beberapa warga binaan liponsos yang ada di kabupaten Sidoarjo

Data Jumlah Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

No.	Bulan	Laki – laki	perempuan	Jumlah
1.	Januari	15 orang	15 orang	30 orang
2.	Februari	25 orang	9 orang	34 orang
3.	Maret	13 orang	12 orang	25 orang
4.	April	20 orang	16 orang	36 orang
5.	Mei	35 orang	28 orang	63 orang
6.	Juni	49 orang	15 orang	64 orang

(Data liponsos : 2019)

Tabel 5

Melihat data sampai akhir Juni permasalahan gelandangan, pengemis maupun anak jalanan semakin tinggi dan belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah ini.

4.2 Kendala dan Pendukung Dinas Sosial Dalam Menertibkan Gepeng dan Anjal

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya yang ada di jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit ditangani. Banyaknya anak jalanan, WTS, gelandangan, pengemis, dan gelandangan psikotik yang kerap kali terlihat memadati setiap perempatan dan ruas-ruas jalan utama bukan

saja tidak sedap dipandang, melainkan menjadi isu serius yang perlu dicarikan jalan pemecahannya bersama. Bahkan sudah ada indikasi bahwa tindakan mereka bukan lagi sekedar persoalan mengisi perut, tetapi sudah berkembang menjadi profesi dengan mengeksploitasi anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi munculnya PMKS jalanan :

1. Kemiskinan sebagai warisan sosial,
2. Kerentanan terhadap pengaruh perilaku menyimpang,
3. Pembiasaan melestarikan perilaku menyimpang untuk memenuhi kebutuhan hidup,
4. Terperangkap oleh mafia PMKS yang pandai membaca dan memanfaatkan peluang situasi.

Upaya mengatasi permasalahan PMKS jalanan di atas tentu harus dilakukan secara komprehensif dengan multi disiplin. Upaya perlindungan perlu dilakukan terhadap keluarga mereka, khususnya terhadap anak-anak, agar fisik dan mental psikologinya dapat berkembang dengan baik, tidak terpengaruh oleh contoh-contoh perilaku yang anormatif, amoral, dan cenderung criminal. Dari aspek yang lain, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang baik melalui pendekatan represif maupun pendekatan persuasif. Tindakan represif bisa dalam bentuk razia, tindakan hukum bagi PMKS jalanan yang melanggar aturan. Sedangkan tindakan persuasif dapat dilakukan dengan memasang poster-poster yang menghimbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta membuat efek jera bagi orang yang memanfaatkan jasa WTS, dengan harapan apabila PMKS

jalanannya itu merasa tempatnya mencari uang sudah dianggap tidak menguntungkan lagi, mereka akan berhenti dengan sendirinya.

Suatu kendala adalah faktor yang tidak lepas dari suatu kegiatan dari hal apapun semua kegiatan pasti akan ada kendala, kendala tersebut dapat berupa kendala yang sangat besar dan kendala yang memang bisa di selesaikan dengan cepat. Kendala apapun itu akan dapat terselesaikan dengan adanya pendukung atau faktor pendukung untuk terlaksananya kegiatan atau program yang sudah dijalankan. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo untuk menanggulangi dan membina gempeng dan anak jalanan.

“ kita terlebih dahulu koordinasi dengan dinas satpol PP kapan jadwal mereka untuk melakukan razia dan ketika sudah pas jadwalnya dengan dinas sosial langsung kita lakukan ke TKP untuk melakukan razia”

Menurut ungkapan wawancara diatas memang kegiatan untuk melakukan razia dalam rangka menanggulangi dan membina gempeng dan anjal dapat terlaksana dengan kerjasama dalam melakukan kegiatan ini meskipun ada kendala seperti harus mencocokkan jadwal terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pada saat kegiatan masih banyak kendala – kendala yang dihadapi dalam penertiban gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan yaitu ketika melakukan razia dan tertangkap kebanyakan bukan orang yang berdomisili di kabupaten Sidoarjo.

“ menjadi kendala adalah ketika merazia kebanyakan dari mereka itu orang drop – dropan dari luar kota sidoarjo jadi untuk mendata juga sedikit susah untuk mengembalikan ”

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Sosial saat merazia gepeng maupun anak jalanan menggunakan identitas yang sama dengan temannya padahal temannya sudah tertangkap terlebih dahulu, sehingga ketika melakukan pendataan untuk dikembalikan ke domisili masing – masing mereka agak lebih susah jadi akan ditampung terlebih dahulu di liponsos selama maksimal 3 hari kalau tidak ada yang mengambil maka akan menjadi warga binaan disitu lain dengan anak jalanan pasti akan diambil oleh oran tuanya dan banyak juga yang masih kabur melalui jendela yang tertutup oleh besi yang besar. Dan para pengemis yang sudah berkali – kali tertangkap itu tidak memiliki rasa takut meskipun pada saat ditertibkan sampai nangis – nangis tetapi tidak ada pilih kasih kalau sudah mengganggu ketertiban umum. Pada saat wawancara ke pengemis tersebut saya bertanya,

Tanya : “ mengapa ibu tidak jera dan kembali ke jalanan kembali padahal ibu juga membawa anak kecil dan seringkali juga tertangkap oleh petugas ?”

Jawab : “ ya ini resiko mas kalau tidak begini saya tidak makan dengan anak saya, suami saya saja sudah meninggal sedangkan saya dan anak saya harus mempertahankan hidup kita sendiri, saya sering mas tertangkap tetapi ya gitu saya keluar langsung ke jalanan lagi karena di liponsos tidak dapat apa – apa”

Mendengar pernyataan dari pengemis diatas dapat dilihat kurangnya ketegasan dalam hal ini Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo dalam membina para PMKS yang sudah

tertangkap sehingga tidak ada efek jera dari para PMKS ini dan akan terus di jalanan Sidoarjo sampai ada ketegasan dalam pembinaan maupun penanganan.

“ saya dijalanan karena memang banyak teman – teman dan bisa kemana mana sesuka hati dan tertangkap nanti pastinya bisa keluar lagi dijemput sama temen yang mengaku kakak saya, jadi bebas mau kemana mana”

Salah satu wawancara saya dengan anak jalanan bernama Fitri asal Krian ini dia tertangkap di daerah pasar larangan yang memang untuk kesekian kalinya tertangkap oleh petugas dan dibawa untuk pembinaan. Dalam hal ini tidak ada jeranya untuk anak jalanan ini karena tidak ada tindakan tegas. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas liponsos yaitu Bapak Ariyo

“ memang disini kendalanya tempat untuk pembinaan malah untuk perkuliahan dari kemendikbud dari jember dan tempat liponsos mungkin terancam pindah di Wonoayu karena kurang perhatiannya untuk tempat penampungan”

Dari ungkapan wawancara diatas bisa kita lihat permasalahan yang memang sangat terlihat sekali yaitu dari pemerintah sendiri yang kurang adanya perhatian untuk masalah PMKS terutama gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Masih banyak gepeng dan anak jalanan di kabupaten Sidoarjo dari mulai perbatasan Sidoarjo sampai pusat perkotaan Sidoarjo masih banyak ditemukan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Dalam pembinaan Dinas Sosial memang tidak dapat optimal secara baik karena kurangnya sumber daya yang memadai dalam Dinas Sosial untuk memikirkan inovasi – inovasi atau program yang memang untuk kebaikan pembinaan dan salah satu

faktor kendala yang paling besar adalah dalam segi anggaran atau keuangan untuk pembinaan lebih lanjut, jadi ketika para gepeng maupun anak jalanan tertangkap akan ditampung di liponsos selama 3 hari itu pun tidak ada pembinaan lebih lanjut karena menunggu instruksi terlebih dahulu untuk melakukan tindakan lebih lanjut untuk para warga binaan yang tertangkap. Ada salah satu warga binaan yang sudah sedikit lama di liponsos yakni para gelandangan yang sudah tidak memiliki keluarga maupun saudara.

Tanya : “ mengapa mbah masih betah tinggal di liponsos yang memang kurang dari kata layak kenapa tidak pindah ke UPT sarwedha ?”

Jawab : “disini enak baik – baik orangnya enggak kayak disana(upt sarwedha)sering ngomong gak baik jadinya saya kabur terus sampe ditangkap lagi, saya gak punya keluarga lagi anak tidak punya suami meninggal.”

Banyak sekali warga binaan yang sudah lanjut usia di liponsos karena hidup menjadi gelandangan dan sebatang kara di jalanan dan di daerah perkotaan yang begitu keras menjadikan mereka hidup menjadi gelandangan dan meminta belas kasihan orang – orang. Sedangkan untuk anak jalanan memang susah untuk diatur kecuali anak jalanan yang biasanya mengamen itu masih dapat diatur karena sekarang sudah ada tempat penampungan yang di gagas oleh alumni dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang tergerak untuk melakukan dan membuat perkumpulan atau komunitas anak jalanan yang mempunyai latar belakang mengamen kalau untuk anak jalanan seperti anak punk itu sedikit susah untuk diatur atau diajak kembali ke jalan yang semestinya karena sudah memiliki kenyamanan sendiri di jalanan.

“ memang untuk anak – anak ini mudah di gerakkan untuk tidak ke jalan lagi kami membuka komunitas ini juga berkerjasama dengan dinas sosial agar anak – anak yang memang mempunyai latar belakang tidak mampu kita dapat membantu untuk dapat melakukan usaha atau berjualan daripada mengamen”

Wawancara diatas pada saat saya menanyakan perihal anak jalanan di komunitas anak jalanan ini yang menjadi ketua komunitasnya ialah mas Dwi Prasetyo. Beliau mengumpulkan anak – anak jalanan agar diberikan keterampilan dan diberikan bekal agar tidak mengamen lagi karena akan membahayakan dirinya sendiri.

“ disini enak mas saya dapat ilmu yang saya tinggalkan waktu SD dulu karena gak punya uang disini saya diajari ngaji yang sebelumnya saya gak bisa ngaji”

Wawancara dengan salah satu anak jalanan yang ada di komunitas ini, mereka banyak yang senang dan tidak mengeluh dengan bimbingan yang diberikan. Komunitas ini berkumpul pada hari sabtu dan minggu di pendopo alun – alun kabupaten Sidoarjo yang memang waktu yang ada dan sedikit luang adalah hari tersebut. Tidak ada biaya sedikitpun untuk pembayaran komunitas ini tetapi yang di dapat dari uang swadaya sendiri dan dibantu oleh dinas sosial kabupaten Sidoarjo.

Dibandingkan di liponsos anak jalanan ini lebih senang jika di komunitas yang didirikan oleh mas Dwi Prasetyo ini karena lebih santai dan mendidik dibandingkan di liponsos.

“ aku gak bisa dapat apa – apa mas di liponsos malah banyak tekanan bukan mendidik makanya masih banyak yang sering keluar (kabur) dari liponsos karena tertekan dan gak bisa santai seperti disini (komunitas anak jalanan)”

Ungkapan anak jalanan ketika perbandingan dari liponsos dengan komunitas anak jalanan yang ada di Alun – Alun kabupaten Sidoarjo. Karena memang di liponsos hanya dibiarkan sampai ada yang menjemput kalau tidak ada baru dialihkan ke komunitas agar dibina lebih lagi di komunitas.

Salah satu faktor pendukung untuk mengurangi adanya gepeng dan anjal ini seperti halnya mas Dwi yang membuka komunitas untuk anak jalanan. Kesadaran masyarakat seperti inilah yang memang harus dilakukan untuk membantu kinerja Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi adanya gepeng dan anak jalanan yang ada di kabupaten Sidoarjo ini. Selain itu masyarakat juga sering membantu memberikan informasi ketika ada permasalahan tentang tidak nyamannya karena adanya orang gelandangan di daerahnya.

4.3 Strategi Dinas Sosial Dalam Menanggulangi dan Membina Gepeng dan Anjal

Perilaku menggepeng, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan. Semasih adanya kesenjangan ini maka urbanisasi akan sulit dibendung, dan akan memberi peluang munculnya kegiatan sector informal seperti kegiatan menggepeng. Kebijakan penanggulangan gepeng yang dikembangkan adalah dengan lebih memacu pembangunan pedesaan agar serasi dengan pembangunan di daerah perkotaan. Pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat pendekatan holistik, yang tidak

hanya terpaku pada pelaku gepeng itu sendiri tetapi berusaha menjangkau seluruh sub sistem yang mempengaruhi munculnya urbanisasi dan perilaku menggepeng, serta termasuk seluruh sumberdaya manusia yang ada. Sumberdaya manusia yang ada di pedesaan diusahakan untuk dikembangkan sebagai subyek pembangunan yang mampu memanfaatkan peluang yang ada serta mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kendala yang dihadapi.

Strategi penanggulangan gepeng yang dikembangkan adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada, serta mengembangkan potensi yang dimiliki dan sedapat mungkin mengurangi kendala-kendala yang ada, yang semuanya diharapkan menyentuh kebutuhan material maupun spiritual. Peluang penanggulangan telah tampak secara nyata, baik di daerah asal (pedesaan) maupun di daerah penerima (perkotaan). Dominasi pendapatan dari peternakan merupakan peluang nyata di daerah asal gepeng. Potensi utama penanggulangan gepeng antara lain dengan adanya sikap menolak dari masyarakat umumnya di daerah asal gepeng terhadap perilaku menggepeng, serta adanya pola pikir yang rasional masyarakat setempat untuk menghadapi lingkungan fisik yang sangat kritis. Tampaknya masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi sehingga potensi inilah yang perlu dikembangkan menjadi kekuatan nyata.

Strategi yang akan dilakukan untuk menanggulangi dan membina gepeng dan anjal Dinas Sosial memiliki beberapa Program para PMKS ini yakni :

1. Manajemen Perubahan Revolusi mental pegawai Dinas Sosial merupakan suatu terobosan baru dalam program penataan pola pikir dan budaya kerja. Dengan diterapkannya strategi yang baru ini dalam menginternalisasi nilai-nilai dan kode etik pegawai Dinas Sosial, diharapkan dapat mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir, dan budaya kerja individu/unit kerja ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan pada tahap Reformasi Birokrasi berikutnya, budaya kerja dapat menjadi culture management system, yakni suatu elemen atau perangkat terukur yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai suatu alat manajemen untuk pencapaian tujuan.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang diberikan mandat sebagai leading sektor penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menyiapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya-upaya dimaksud, sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan dibidang peraturan perundang-undangan harus diperkuat dengan berbagai rencana kegiatan yang meliputi:

- a. adanya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. adanya sarana prasarana yang memadai
- c. adanya peningkatan kompetensi baik tenaga perancang sebagai perancang peraturan perundang-undangan maupun kompetensi perumus standar

Ketika saya wawancara dengan ibu Sri Asih dari Dinas Sosial memang mengatakan penguatan peraturan lebih diperkuat lagi

“kita menangkap juga mempunyai payung hukum yaitu peraturan daerah no. 10 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, yang menjadi pegangan saat menertibkan para PMKS”

Hukum memang sangat penting dalam setiap melakukan tindakan seperti penertiban karena ketika sudah tidak ada payung hukum yang menaungi maka tidak akan ada yang namanya penertiban untuk kenyamanan masyarakat. Akan ada banyak masalah sosial di perkotaan dan akan menjadi tidak kondusif banyak kriminalitas banyak penyalahgunaan yang biasa digunakan untuk anak jalanan. Jadi perlunya ada hukum memang sangat penting bagi perkotaan agar terhindar dari masalah – masalah yang bertahun tahun tidak pernah hilang.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Gepeng , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak -

anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah begitupula dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

3. Penguatan Sistem Manajemen SDM

ASN merupakan modal yang sangat penting dalam suatu organisasi, selain karena mempunyai rate of return tertinggi, juga karena merupakan mesin penggerak organisasi. Kaitannya dengan peran ASN dalam suatu organisasi maka perlu dikembangkan manajemen ASN untuk mewujudkan ASN Dinas Sosial yang berkualitas, memiliki kompetensi yang diharapkan, dan berperilaku sesuai budaya kerja dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam tugas-tugas pengawasan, maupun tugas dalam layanan publik.

a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan meningkatnya fungsi Dinas Sosial, meningkat pula beban kerja yang

dilakukannya. Untuk memperkirakan kebutuhan pegawai yang ideal maka perlu dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis Jabatan dan Analisis. Beban Kerja dengan tetap mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk kemudian ditetapkan dalam perhitungan formasi jabatan. Untuk mendukung upaya ini maka perlu dilakukan finalisasi penyusunan Pedoman Analisis Beban Kerja serta membangun dan mengembangkan aplikasi Analisis Beban Kerja agar terdapat pemahaman yang sama dan memudahkan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai.

b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Dasar rekrutmen pegawai adalah adanya kebutuhan pegawai baik kebutuhan akan kompetensi maupun jumlah pegawai. Oleh karena itu, rekrutmen tidak akan lepas dari perencanaan pegawai, analisis beban kerja, maupun analisis jabatan.

Hal lain yang terkait dengan rekrutmen adalah metode rekrutmen, termasuk penentuan minimal requirement, sehingga menghasilkan kualifikasi ASN dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial dan prosesnya dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, bebas KKN, dan memberikan kesempatan yang sama besar untuk seluruh pelamar dalam kompetisi formasi. Untuk membenahi seluruh rangkaian dalam sistem rekrutmen pegawai Dinas Sosial, dilakukan pemantapan, salah satunya dengan terus melakukan review dan pengembangan aplikasi e-rekrutmen dan

aplikasi CAT. Dalam pelaksanaan rekrutmen diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam mengadakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan CAT. Dalam penyusunan soal akan dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi atau instansi pembina dari jabatan fungsional tertentu yang terkait. Selain itu apabila telah diperoleh CPNS maka akan dilakukan upaya pembinaan terhadap pegawai tersebut melalui Diklat Orientasi CPNS dan dilakukan evaluasi kinerja.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.

Review dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Soft Kompetensi dan Kompetensi Teknis perlu segera dilakukan sebagai dasar untuk penentuan pola peningkatan dan pengembangan kompetensi. Pola peningkatan kemampuan soft maupun hard competencies perlu ditingkatkan pengelolaannya sehingga training atau fellowship yang dilakukan dapat didasarkan pada kebutuhan dan terpola untuk sekian tahun ke depan melalui Analisis Kebutuhan Diklat, bukan dititikberatkan pada kebutuhan sesaat. Selain itu pemetaan kompetensi melalui asesmen / penilaian kompetensi pegawai perlu dilakukan updating minimal 2 (dua) tahun sekali dan dilakukan secara bertahap. Sehingga gap kompetensi dari masing-masing pegawai dapat segera terpetakan dan dapat dipenuhi dengan peningkatan pengembangan kompetensi. Selain itu hasil pemetaan kompetensi ini dapat digunakan untuk menyaring talent pool ke dalam kelompok suksesi atau kader Dinas Sosial,

serta sebagai dasar penempatan ke dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi tiap level.

Penempatan pegawai yang tepat pada pekerjaan dan lingkungan yang tepat pula, akan menghasilkan kinerja terbaik untuk organisasi dan pegawai tersebut. Asesmen / penilaian kompetensi pegawai yang sedang dilakukan digunakan untuk mengetahui kompetensi seseorang pegawai dan pekerjaan serta lingkungan yang mana yang paling baik untuk pegawai tersebut, bahkan asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui potensi pegawai yang bersangkutan.

- Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya. Seseorang yang sedang mengalami masalah, sering kali tidak memilikikesadaran bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien dan mendorongnya untuk dapat melakukan perubahan pada kehidupannya.kesadaran tentang kekuatan yang ada pada diri klien inilah yang menimbulkan suatu nilai terkenal yang dijunjung tinggi dalam pekerjaan sosial, yakni *self determination* (keputusan oleh diri sendiri). Pekerja sosial dalam konteks ini dapat berperan sebagai konselor, pendidik, penyedia layanan, atau perubah perilaku.

- Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan. Ibarat memancing, dalam konteks memberdayakan masyarakat, jika dulu cukup memberikan kailnya saja. Dengan memberikan pelatihan skill tertentu (misalnya kewirausahaan) kepada rakyat miskin, mungkin sudah cukup menyelesaikan problem kemiskinan. Namun, kail saja kini rasanya tidak cukup. Sebab, bagaimana mungkin bisa memancing padahal “kolam” nya saja sudah tidak tersedia, atau klien merasa kebingungan di “kolam” mana mungkin dia akan melemparkan kailnya. Dalam hal ini pekerjaan sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupun menghubungkan klien kepada jaringan-jaringan sumber yang dibutuhkan seorang klien, untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan kehidupannya. Menjadi broker atau pialang sosial adalah suatu peran strategis, yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial untuk mencapai tujuan ini.
- Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya, agar berjalan secara efektif. Pekerja sosial berperan dalam menjamin agar lembaga-lembaga sosial dapat memberikan pelayanan terhadap klien secara merata dan efektif. Langkah ini dilakukan karena lembaga-lembaga sosial dianggap sebagai salah satu peranti untuk mencapai tujuan-tujuan dari disiplin ilmu pekerjaan sosial. Peran-peran yang dapat dilakukan pekerja sosial antara lain, pengembang program, supervisor, koordinator ataupun konsultan. Sebagai penganbang program, pekerja sosial dapat mendorong atau merancang program sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai supervisor, pekerja sosial dapat meningkatkan kinerja pelayanan lembaga sosial melalui supervise yang

dilakukan terhadap staf-stafnya. Sedangkan, dalam konteks coordinator, pekerja sosial dapat meningkatkan system pelayanan, dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara sumber-sumber pelayanan kemanusiaan. Memandu lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat diperankan oleh pekerja sosial sebagai konsultan.

- Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Disinilah pekerjaan sosial memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan sosial maupun dengan kebijakan sosial. Yang pertama sebagai tujuan akhirnya sedang kedua sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Keduanya berada dalam wilayah kajian pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana (*planner*) atau pengembang kebijakan (*policy developer*).
- Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Kelompok rentan yang dimaksud seperti orang lanjut usia, kaum perempuan, gay, lesbian, orang yang cacat fisik maupun mental, pengidap HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok marjinal lainnya. Lazimnya, kelompok masyarakat seperti ini sangat rentan terhadap pengabaian hak-haknya, sehingga perlu dilindungi agar memperoleh hak-haknya secara memadai. Selain hak-hak keadilan dan kesejahteraan sosial diperlukan juga upaya untuk memberikan perlindungan kepada mereka untuk memperoleh hak-hak keadilan secara ekonomi. Misalnya, peluang untuk memperoleh pekerjaan atau pelayanan

kesehatan. Sebab tidak jarang kelompok rentan seperti ini kurang mendapat perhatian dalam hak-haknya secara ekonomi.

- Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional. Pekerjaan sosial diharapkan memiliki dasar-dasar keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi dalam praktiknya. Sehingga perlu ada upaya pengembangan maupun uji kelayakan terhadap pekerja sosial sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar praktik pekerjaan sosial yang dilakukan tidak menyimpang, dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi dari masyarakat dapat mempengaruhi jalannya implementasi sebuah kebijakan. Masyarakat yang lebih terbuka akan lebih mudah untuk menerima kebijakan yang diberikan pemerintah. Kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan ini secara perlahan dapat diterima masyarakat dengan baik, walaupun masyarakat sendiri keberatan dengan adanya sanksi hukum yang ditujukan juga kepada masyarakat yang melanggar ketentuan larangan. Namun, saat ini masyarakat sudah mulai terbuka dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan gepeng dan anjal tersebut. Adanya kesadaran masyarakat yang mulai mengajukan permintaan pengadaan kegiatan sosialisasi terkait dengan PMKS yang diantaranya ada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di lingkungan mereka. Hal ini telah membuka celah bagi pemerintah untuk bisa sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Didukung dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini juga akan semakin memudahkan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan gepeng kepada masyarakat. Masyarakat juga lebih mudah untuk mengadakan atau melaporkan adanya permasalahan terkait dengan gepeng dan anjal melalui media komunikasi telepon maupun pesan singkat. Dengan begitu informasi akan lebih cepat diterima oleh petugas untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Meski demikian, tidak semua masyarakat peduli dengan keberadaan gepeng maupun anjal yang mereka jumpai. Hal tersebut dikarenakan stigma dari masyarakat terhadap gepeng serta anjal yang masih negatif. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa gepeng ini sulit untuk berubah apalagi gepeng dengan kondisi gangguan jiwa sedangkan pandangan untuk anak jalanan cenderung negative karena dapat berbuat kerusuhan. Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah memang hal yang wajar, apalagi jika kebijakan tersebut dirasa membebani masyarakat sebagai pihak yang dikenai kebijakan tersebut. Akan tetapi dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan tersebut membuat kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

Untuk program Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo sebenarnya cukup bagus tetapi belum optimal sepenuhnya.

“ kalau program kita itu ada untuk pembinaan tindak lanjut untuk seluruh usia yang memang ada sesuai umur yang tertangkap, kita berkerjasama dengan seluruh UPT yang ada di provinsi Jawa Timur”

Menurut wawancara diatas program yang di gagas oleh Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo memang berkerja sama dengan UPT di provinsi Jawa Timur seperti usia yang lanjut akan di data terlebih dahulu ke keluarganya setelah tidak ada yang mengambil atau menjemput akan menjadi warga binaan setelah itu akan dipindahkan di UPT SARWEDHA yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur. Karena sudah tidak ada lagi yang mampu menampung kecuali di UPT SARWEDHA karena khusus untuk seseorang yang tidak memiliki keluarga dan sudah lanjut usia. Rata – rata yang tidak diambil seperti itu kebanyakan sudah tidak ada keluarga yang mampu atau juga sudah dibuang oleh anaknya sendiri.

“saya disini bahagia mas, banyak teman – teman yang bisa menghibur meskipun saya pindah teman – teman saya juga pasti pindah kesana. Saya tidak punya keluarga mas dibuang sama anak saya karena menantu saya tidak mau ditumpangi rumahnya sama saya”

Setelah wawancara saya dengan salah satu gelandangan bernama mbah kemi yang memang sedikit pelupa (pikun) yang ada di liponsos yang akan dipindahkan ke UPT SARWEDHA. Masih banyak dengan latar belakang yang sama kebanyakan memang sudah dibuang sendiri oleh anaknya sehingga tidak mau mengambil orang tuanya. Banyak juga yang memang akan menitipkan ke liponsos cuma Dinas Sosial menolak karena liponsos bukan tempat penampungan tetapi tempat pembinaan itu juga hanya sementara tidak lebih dari 3 hari kecuali yang memang tidak ada identitas akan ditampung dulu sebelum dipindahkan ke UPT milik Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk anak jalanan atau gepeng yang berusia anak – anak akan di pindahkan di UPT Jombang.

“ iya kalau untuk yag berusia anak-anak akan kami pindahkan ke UPT Jombang untuk pelatihan selama 6 bulan dan pulang dari pelatihan akan diberi bekal dan peralatan untuk membuka usaha saat dikembalikan”

Kalau untuk anak jalanan atau gepeng yang berusia muda akan ditempatkan di Jombang dan kembali akan diberikan perlatan atau modal untuk membuka usaha yang biasa di berikan adalah seperti peralatan teknik untuk membuka tambal ban atau bengkel sehingga tidak ada yang akan kembali di jalanan.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis maupun anak jalanan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan di jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis maupun anak jalanan menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan. Usaha sebagaimana dimaksud antara lain dengan:

- a) penyuluhan dan bimbingan sosial
- b) pembinaan sosial
- c) bantuan sosial
- d) perluasan kesempatan kerja
- e) pemukiman lokal
- f) peningkatan derajat kesehatan.

Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis serta anak jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan di jalanan perkotaan. Usaha represif sebagaimanadimaksud meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.

Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan dengan meningkatkan kesadaran berswadaya, memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, dan menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif sebagaimana dilaksanakan melalui Panti Sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1) Dalam penanganan memang dari Dinas Sosial tetapi yang memang berwenang untuk melakukan razia tersebut adalah dari Dinas Satpol PP dan setelah di razia inilah tugas dari Dinas Sosial yaitu untuk membina para gepeng dan anak jalanan. Sesuai dengan tugas masing – masing ini jadi adanya saling kerjasama untuk menanggulangi dan membina gepeng maupun anak jalanan yang ada di kabupaten Sidoarjo lebih tentram dan nyaman. Meskipun tidak bisa menghilangkan masalah ini setidaknya bisa mengurangi agar lebih jera dan tidak kembali lagi untuk hidup di jalanan.

2) FAKTOR KENDALA :

- Manajemen sumber daya manusia yang kurang untuk pembinaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan
- Dana dari pemerintah untuk pembinaan masih kurang karena masalah sosial ini semakin banyak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dana yang diberikan dari pemerintah hanya untuk akomodasi penertiban

- Tempat pembinaan yang kurang luas untuk mencakup banyaknya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang setiap hari ada masuk dalam tempat pembinaan.

3) FAKTOR PENDUKUNG :

- Adanya dukungan masyarakat yang membantu dengan membuat komunitas untuk anak jalanan dengan diberikan pembinaan untuk dapat bekerja dan diberi bimbingan agama dan keterampilan.

4) Adanya Strategi untuk mengurangi beberapa masalah sosial seperti :

- Manajemen Perubahan Revolusi mental pegawai Dinas Sosial merupakan suatu terobosan baru dalam program penataan pola pikir dan budaya kerja.
- Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- Penguatan Sistem Manajemen SDM
- Program Pembinaan

5.2 SARAN

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan masalah sosial ini karena semakin bertambah jumlah dari masalah ini khususnya di daerah kabupaten Sidoarjo. Sebaiknya strategi yang harusnya diterapkan adalah sikap yang lebih tegas dari Dinas Sosial untuk menangani atau membina permasalahan sosial ini agar setidaknya dapat mengurangi meskipun tidak bisa menghilangkan tetapi kalau

memang dari Dinas Sosial sendiri menerapkan strategi tegas untuk masalah sosial ini akan menjadi ketakutan tersendiri untuk datang ke Sidoarjo.

2. Pemerintah juga harusnya melihat keadaan dalam liponsos kabupaten Sidoarjo yang sekarang sudah banyak fungsi sehingga pembinan untuk gelandangan, pengemis, dan anak jalanan menjadi kurang optimal.
3. Program harus lebih di optimalkan dan lebih tegas agar dapat mengurangi masalah sosial dan dapat bekerja lebih layak.